# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

PenelitianVini akan mengkaji atau menjelaskaVbagaimana peran negara dalam pengelolaanVkekayaan alam di daerah. Desa KemangVmerupakan salah satu daerahVyang memiliki kekayaanValam yang melimpah akan tetapi hadirnyaVkegiatanVtambang-tambangVilegalVmengasumsikanVbahwa pengelolaan tersebut tidak diolahVdengan baik. TumbuhVsuburnya pengelolaanVminyak secara ilegalVyang telah terjadi di Desa Kemang dilakukanVdi area perkebunanVkaret. Hal ini mengindikasikanVbahwa adanya tambang minyak ilegal yang beroperasi sejak tahun 2015 hingga saat ini penambanganVminyak illegal di Desa Kemang masih berlangsungVhal ini mengindikasikanVadanya penyimpanganVdalam pengeloaanVSumber daya alam. KarenaVpemerintah absenVatau tidak hadirVdalam pengelolaan tersebutVsebagaimanaVmestinya.[[1]](#footnote-2)

Pengelolaan Sumber daya alamVseharusnya diatur oleh negara atau fungsi negaraVdalam pengelolaan Sumber daya alam ialahVsebagai administrator sepeti diaturVdalam Undang-undang 1945 pasalV33 yang berbunyi bumi,air, danVkekayaan alam yang terkandungVdi dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untukVsebesar-besar kemakmuranVrakyat. DalamVhal ini kekayaanVSumber daya alam yangVada seharusnya manfaatnya dapat di rasakan olehVseluruh masyarakat[[2]](#footnote-3).SementaraVitu dalam kasus ini potensi SumberVdaya alam yang melimpahVhanyaVdi nikmati oleh segelitir orang. TambangVminyak ilegal yang terjadiVdi Desa Kemang ini terjadi karena rendahnyaVpengetahuan tentang regulasi yangVmengatur tentang Sumber dayaValam dan pendapatVmereka yang menggangapVbahwa lahan yang mereka milikiVialah sepenuhnya milik mereka, ditambahVlagi dengan tidak adanyaVsosialisasiVdari pihak pemerintah terhadap masyarakat sehingga mereka semakinVleluasa untuk mengambil kekayaanVminyak di Desa Kemang kec. Sanga Desa kab. Musi Banyuasin.

Dalam rangkaVdesentralisasi pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengelola potensi Vsumberdaya alamVyang ada di daerahnya.Dijelaskan dalamVUndang-undang No 23 tahun 2014 tentang pemerintahVdaerah (revisiVdari undang-undang NoV32 tahun 2004), memberikanVkewenangan pengelolaanVsumberdayaValam khususnya pertambanganVpada tiap-tiap daerah.Ditetapkannya kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah, yang dilegalkanVdengan dikeluarkannya UU terbaru No. 23VTahun 2014.VHubungan tersebut menimbulkanVhubungan administrasi danVkewilayahan antar susunanVpemerintah.Berdasarkan undang-undangVtersebut seharusnya pemerintahVKabupaten Musi BanyuasinVmemiliki kuasa untuk mengelolaVsumber daya alam di daerahnya, namun jika melihatVkasus menjamurnya tambangVminyak ilegal di kecamatan Sanga Desa. PenulisVmengasumsikan dampakVhilangnya peran negaraVdalam pengelolaan sumber daya alam ialahVadanya tambang minyak ilegalVdikecamatan Sanga Desa.

Dalam kontesksVpenelitian ini, peneliti melihat bahwa Kabupaten Musi Banyuasin adalahVdaerah yang memiliki sumberdaya alamVyang melimpah, pada awal tahun 2015 penemuanVminyak tanpa disengaja oleh Vmasyarakat setempat terdapatVmenurut warga setempat tambang minyak setempat ialah peninggalanVBelanda yang beradaVdi Desa Kemang Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin. Kemudian masyarakatVsetempat melaukan pengelolaanVsecara tradisional atauVtidak memiliki izin dari pemerintah daerah.[[3]](#footnote-4)Hal ini mengidikasikanVhilangnya peran negara/pemerintah daerah setempat dalamVpengelolaan sumberVdaya alam.VPadahalidealnya Pemerintah Kecamatan Sanga Desa mempunyaiVkuasa atas pengelolaan sumber daya alamV(tambang).

Adanya perkaraVgelap penambangan sumber daya alamVyang terjadi di Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi BanyuasinVini mengindikasikan terdapatVrelasi kuasa yang tidak kasat mata bermainVdalam pengelolaan sumber daya alam.VKekuatan-kekuatan lokal ini yangVdisebut sebagai elit lokal atauVorang kuat lokal. Menurut Keller,VDalam sebuah kelompok

masyarakatVterdapat beberapa individu yang memilikiVpengaruh dan peranan yangVkuat, mereka inilahVyang disebut elit.[[4]](#footnote-5)

PenghasilanVyang menjanjikanVmendorong masyarakat setempat membuatVsumur minyak dilahan merekaVdikarnakan mayoritas pencaharian masyarakatVdi Kecamatan Sanga Desa sebagai petaniVkaret dan nelayan sementaraVpenghasilan mereka dipengaruhi oleh hargaVkaret yang tidak stabil dan sebagaiVnelayan masyarakat Sanga DesaVmenggunakan alat yang tidak ramahVlingkungan sehingga merusak ekologiVsungai yang berdampak berkurangnyaVpopulasi Ikan sungai Musi, hal tersebutlahVyang menyebabkanVmasyarakat beralihVprofesi dari petani karet danVnelayan menjadiVpenambang minyak.

KeberadaanVtambang minyak ilegal di desa KemangVyang tumbuh suburVmenunjukan adanyaVpertukaran kepentinganVantara kelompok penambangVminyak dengan negaraVyang terjadi dibalikVlayar. Dalam kasus ini kelompokVpenambang minyakVmerekrut pejabatVpublik dengan tujuan untuk menghindariVkonflik antara penegakVhukum yang berwenang sementaraVpemegang kekuasaanVberupanya mendapatkanVkeuntungan dengan memanfaatkanVkedudukan dan kekuasaanVdemi mendapatkan keuntungan.Vtimbal balik yangVdiberikan pemegangVkekuasaan dari transaksi tersebutVbukan berupa perizianVformal akan tetapi berupaVjaminan keamanan dalam kegiatanVpertambangan ilegal tersebut.

KemudianVdisisilain dalam kasusVtambang minyak illegal terdapat transaksi kepentingan yangVdapat dilihat atau diamatidariVtambang milik warga yangVdikelola oleh kelompok tambangVyang anggotannya terdiri dari pemilikVtanah, pemilik modalVdan pemegang kekuasaan.SelainVitu juga permasalahanVlainnya yang terjadi diVarea perkebunan iniVadalah masyarakat menambangVsecara illegal sehingga tidak adaVaturan yang mengatur jarakVantara sumur yangVsatu dengan sumurVyang lainnya, sehingga hal iniVsangat beresiko bagi para pekerjaVtambang dan masyarakat yang ada disekitar.VDalam melakukan pekerjaan penambang,Vsering terjadi kecelakaan yangVdisebabkan kurangnya pemahamanVdanVkesadaran diri para penambangVsehingga membahayakanVbagi penambang.

BanyaknyaVSumber daya alamVyang ada diVDesa KemangVkec. Sanga DesaVterutamaVdalamVhalVpertambanganVminyak.VDalamVhalViniVseharusnya negara ikutVhadirVsebagai penegakVperaturanVyang ada. Akan tetapVketidakVhadiran negara jugaVmenimbulkanVsebuahVtanda Tanya tidakVmungkin jika pemerintahVsetempat tidakVmengetahuiVfenomena penambanganVminyak yang terjadiVdi Desa Kemang Kecamatan Sanga DesaVKabupatenVMusi Banyuasin. Jika melihatVfenomena yangVada memungkinkanVjika adaVrelasi antara kelompokVpenambang masyarakat danVpemerintahanVyang ada diVdesa KemangVsehingga terkesan memeliharaVkelompok penambangVminyak dalamVkasus ini.

Patronase,Vsuatu hubungan pertukaranVdisebut patronaseVapabila menunjukkanVbeberapaVkarakteristikVkhusus.VPatronaseVbiasanya didefinisikanVsebagai kekuasaan untuk memberikanVberbagai tugas pada mesin biokrasiVdisemua tingkatan. Tapi, dalamVpengertian yang lebihVluas, patronaseVberarti pendistribusianVberbagai sumber dayaVyang berharga : pensiun,Vlisensi atau kontakVpublik berdasarkan kriteriaVpolitik.VPada kebanyakanVkasus patronaseVpolitik tidak demokratis maupunVfungsional.[[5]](#footnote-6)

Patron ialah seorangVyang memegang pucukVkekuasaan,Vdan memimpinVpelaksaan kebijakan. KlienVdiidentifikasihkan sebagaiVpengikut setia, pekerjaVbirokrasi yang mematuhiVaturan-aturan patron. Dalam analogi lain, patronVialah majikan dan klien ialahVanak buah. TerminologiVpolitik modernVmenyebutkan, sangat sulit untukVmemisahkan antara politisi sebagai ‘aktor politik’Votonom dengan birokrasi. Ini karenaVaktor politik tidak hanya bertindakVsebagai aktor pembuat kebijakan tetapi juga melakukan penetrasiVterhadap gelanggangVbirokrasi.[[6]](#footnote-7)

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarVbelakang di atas, makaVpenelitian merumuskan permasalahanVdalam penelitian ini sebagai berikut:

1. BagaimanaVperan negara dalam pengelolaan tambangVminyak di desa Kemang?
2. Bagaimana pola relasi aktor patronase dalam pengelolaan tambang minyak ilegal di Desa Kemang?

**C. Batasan Masalah**

Agar penelitianini lebih terarahVpeneliti membatasi permasalahan dengan hanya mengkajiVbagaimana relasi yang terbangunVdalam politik pertambanganVyang ada didesa Kemang kec. Sanga Desa kab. Musi Banyuasin.

## D. Tujuan Penelitian

1. `Untuk mengetahuiVperan negara dalam pengelolaanVtambang minyak di desa kemang.
2. Untuk mengetahui pola relasi aktor patronase dalam pengelolaan tambang minyak ilegal di desa kemang.

## E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaanVdan manfaat yang diharapkanVdari penelitian ini yaitu sebagaiVberikut :

## Kegunaan Akademis

1. MemperkayaVilmu pengetahuanVdalam bidang politik, terutama yang berkaitan denganVpenguasaan Sumber daya alam, pola relasi antar aktor dalam mengelolaVtambang minyak ilegalVdi desa kemangVkec. Sanga Desa kab. Musi Banyuasin
2. Hasil penelitian diharapkanVdapat memberikan informasiVkepada pihak lainVyang berkepentingan mengenaiVpertambangan minyak di desaVKemang kecamatan Sanga DesaVkababupaten Musi Banyuasin.

## Kegunaan Praktis

1. **Bagi penulis**
2. SebagaiVsalah satuVsyarat untuk menyelesaikan studi strata satu pada Universitas IslamVNegeri Raden Fatah Palembang.
3. Untuk menambahVwawasan tentang kekuasaan,Vrelasi dan kepentinganVdalam kerangka praktik pertambanganVminyak ilegal di desa KemangVkecamatan Sanga Desa kababupaten Musi Banyuasin.
4. **Bagi pemerintahVDaerah**
5. Penelitian iniVdi harapkan sebagai sumbanganVpemikiran yang kiranya dapatVdigunakan sebagai acuan danVpertimbangan PemerintahVDaerah Kemang Kecamatan Sanga DesaVkabupaten Musi Banyuasin untukVdapat mengelola sumber daya alamVyang ada menjadi pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

**F.** Tinjauan Pustaka

KajianVrelasi kuasa dalam pengelolaan sumberVdaya alam di daerah sudah banyakVdilakukan sebelumnya yang dilakukanVoleh para peneliti terdahulu :

*Pertama,* Erwiza Erman dengan studi kasusVbisnis timah di BangkaVyang menyimpulkan bahwaVada kekuatan-kekuatan yang bermain dalam bisnis ilegal tersebut, yang melibatkanVorang kuat yang sangat licin dan kebal hukum,Vorang kuat ini bahkan mengendalikanVaparat keamanan. PenguasaanVtambang timah di Bangka yang melibatkanVorang kuat lokal yang mempengaruhiVkebijakan-kebijakan pemerintah.

*Kedua*, YulionVZalpa, dalam penelitiannya menyimpulkanVbahwa penguasaan sektor tambangVbatu bara di Kabupaten Lahat akibatVterjadinya relasi kuasaVantara Pemerintah Darah,pengusahaVsekaligus orang kuat lokal. Penelitian tersebutVmenguatkan bukti bahwa kebijakanVdesentralisasi atau otonomi daerahVmenyebabkan munculnya orang-orangVkuat lokal yang membajakVdemokrasi atau konsolidasi kekuatan-kekuatan lokalVdi daerah (oligarki).[[7]](#footnote-8)

*Ketiga*, Syarif Hidayat,Vyang menyimpulkan bahwa betapa kuatnya peran orang kuat lokal dalam mengusasi perekonomian di daerah. Dengan mengambil studi kasus di Banten, mereka membuktikanVbahwa sosok kuat Tubagus Chasan Sochib dapat mengkondisikan perekonomian di daerah dengan mengkonsolidasikan sumber daya-sumber daya yang ada.[[8]](#footnote-9)

**G**. Kerangka Teori

Untuk menganalisa fenomena elit lokal di daerah peneliti meminjam teori Joel Migdal mengenai orang kuat lokal *(local trongmen)*. Teori ini dianggap peneliti mampu menjelaskan dan mengurai fenomena yang terjadi di Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin. Menurut Joel Migdal orang kuat lokal, secara konsep, didefinisikan sebagai kekuatan informal, baik yang berupa “tuan tanah”, tengkulak, pengusaha, kepala suku, bos, petani kaya, pemimpin klan dan sebagainya yang berusaha memonipoli kontrol atas masyarakat dalam cakupan wilayah tertentu lewat kerjasama jejaring yang mereka bangun.[[9]](#footnote-10)

Orang kuat lokal ini menempati wilayah tertentu yang strategis untuk menjalankan kekuasaannya. Desentralisasi memberikan peluang untuk muncul dan berkembangnya orang kuat lokal di daerah, hal ini sama halnya dengan fenomena yang terjadi di Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin, dimana orang kuat lokal memanfaatkan desentralisasi untuk melanggengkan kekuasaannya dalam memonopoli atas kontrol masyarakat di daerah. Berkuasanya orang kuat lokal adalah hasil dari segitiga penyesuaian antara “politisi”, “birokrat lokal” dan “pengusaha” yang membangun apa yang disebut oleh Joel Migdal sebagai jejaring pertukaran sosial ekonomi dan politik.

Mengenai fenomena orang kuat lokal tersebut, Joel Migdal[[10]](#footnote-11) memiliki tiga argumentasi yang saling berkaitan, yaitu: *Pertama,* orang kuat lokal tumbuh subur di dalam masyarakat ”mirip jaringan”. Berkat struktur masyarakat mirip jaringan, orang kuat lokal memperoleh pengaruh signifikan jauh melampaui pengaruh para pemimpin negara dan para birokrat lokal yang digambarkan Migdal sebagai ”segitiga penyesuaian”.

*Kedua****,*** orang kuat lokal melakukan kontrol sosial dengan memanfaatkan komponen penting yang diyakini masyarakat sebagai ‘strategi bertahan hidup’. Logika bertahan hidup memberi kesempatan bagi orang kuat lokal bukan saja untuk membangun legitimasinya di mata rakyat yang mengharapkan ibanya untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka, tetapi juga memperluas kekuasaannya. Personalisme orang kuat lokal menempatkan mereka sebagai patron bagi kliennya yang (serba) kekurangan di derah kekuasaan mereka. *Ketiga,* orang kuat lokal secara langsung ataupun tidak telah berhasil membatasi kapasitas lembaga dan aparatur negara sehingga menyebabkan pemerintah lemah. Argumen Joel Migdal di atas dibuktikan oleh beberapa peneliti yaitu Erwiza Erman yang melakukan penelitian mengenai orang kuat lokal di Bangka. Erwiza mengungkapkan bahwa lemahnya otoritas Pemerintah Daerah Bangka membuat pemerintahan formal menjalin relasi kekuasaan dengan pemerintahan informal “*local strongmen*” yang di sebut dengan Raja Timah 2. Ia disebut sebagai Raja Timah 2 di Bangka karena dia memiliki pengaruh besar pada harga timah dan pada perekonomian penambang di Bangka. Hal ini dibuktikan dengan tertangkapnya Raja Timah 2 atas kasus penyelundupan 600 ton pasir timah lewat Singapura pada akhir tahun 2001 sangat berpengaruh terhadap jatuhnya harga timah secara drastis dari 18.000 rupiah ke 12.000 rupiah perkilogram, dan pemasaran pasir timah sulit. Tertangkapnya Raja Timah 2 atas penyelundupan timah tak memberikan hukuman terhadapnya, kasus penyelundupan tersebut kemudian menghilang dari sorotan publik. Timah yang disita polisi dikembalikan, karena institusi polisi tidak sanggup membayar sewa gedung. Pemberian prokteksi, sikap kolaboratif ataupun ikut aktif dalam bisnis timah ini bukan tidak diakui oleh para pejabat penegak hukum. Ketidakberdayaan aparat keamanan mengatasi penyelundupan adalah cerminan lemahnya institusi negara. Hal ini membuktikan bahwa lemahnya pemerintah fomal dalam pengelolaan sumber daya alam sehingga memunculkanpemerintahan informal yang mempunyai modal dan pengaruh yang lebih besar pada perekonomian daerah.[[11]](#footnote-12) Vedi R. Hadiz juga melakukan analisa mengenai fenomena “orang kuat lokal”, mesin politik lokal yang korup dan daya tahan beberapa kelompok otoritarian di kawasan Asia Tenggara yang sedang mengalami reformasi politik seperti Filipina, Thailand dan Indonesia. Justru melalui slogan tata pemerintahan yang baik, desentralisasi memberikan jalan bagi kebangkitan dan konsolidasi “orang kuat lokal”. Secara nyata desentralisasi telah dibajak oleh kepentingan *predatoris* atau penghisap lokal.

Dengan adanya sistem desentralisasi di Indonesia, memberi kesempatan bagi orang kuat lokal hadir dan bangkit dalam desentralisasi di Indonesia. Hadiz menggunakan istilah oligarki lokal atau bos lokal yang mempunyai makna yang hampir sama dengan orang kuat lokal. Dengan munculnya orang kuat lokal yang memanfaatkan sistem desentralisasi untuk menguasai wilayah-wilayah di daerah dengan cara membangun jejaring, baik dengan politisi, birokrat dan pengusaha akan semakin memberikan pengaruh yang besar terhadap orang kuat lokal sehingga akan membentuk apa yang di sebut dengan sistem oligarki.

Ia melihat bahwa faktor struktural yang memunculkan atau membangkitkan bentuk khusus oligarki politik-bisnis di Indonesia, terutama bagaimana otoritas negara dan kepentingan borjuis secara historis tumbuh berinteraksi, dan berpadu semasa Orde Baru. Otoritas negara dan borjuis di Indonesia berubah dari bentuk barnopati pada masa awal pemerintahan Soeharto menjadi bentuk oligarkis pada akhir Orde Baru.[[12]](#footnote-13)

Syarif Hidayat yang melakukan penelitian mengenai kekuasaan orang kuat lokal bernama Tubagus Chasan Sochib di Banten. Syarif Hidayat menggunakan teori “negara bayangan” (*Shadow state*) dan “pemerintah informal” dalam penelitiannya. Menurutnya sebagai pengusaha besar di Banten ternyata Tubagus Chasan Sochib juga menjadi pemimpin besar kelompok Jawara Banten dan berteman dekat dengan banyak tokoh besar nasional seperti Jendral Wiranto. Tubagus Chasan Sochib berserta kelompok Jawaranya berhasil menguasai politik lokal di Banten untuk mendapatkan akses terhadap sumberdaya yang di kontrol oleh Pemerintah Daerah. Tubagus Chasan Sochib sebagai orang kuat lokal memiliki dua sumberdaya sekaligus yang tidak dimiliki pesaing lainnya yakni sumberdaya kekerasan dan sumberdaya keuangan.

Pada masa orde baru Tubagus Chasan Sochib menjadi sesepuh partai Golkar dan ketika era desentralisasi Tubagus Chasan Sochib berhasil memenangkan anaknya, Ratu Atut Chosiyah menjadi Wakil Gubernur Banten dan kemudian menjadi Gubernur Banten. Tubagus Chasan Sochib yang disebut dengan sebutan “Tuan Besar” menjalankan praktek “negara bayangan” dan “pemerintahan informal” di Banten. Sebagai Tuan Besar di Banten, Tubagus Chasan Sochib dapat mengatur jabatan-jabatan politik dan proyek-proyek pemerintah di Banten.[[13]](#footnote-14)

Leo Agustino juga melakukan penelitian mengenai dinasti politik yang dibentuk oleh keturunan-keturunan “orang kuat lokal” Tubagus Chasan Sochib di Banten. Tuan Besar bukan saja telah menjadi “orang kuat lokal” di Banten tetapi telah berhasil membangun dinasti politik di Banten dengan mendudukan anak-anaknya, istri-istrinya, menantunya dan cucunya menjadi Gubernur, Walikota, Wakil Walikota, Anggota DPRD Kabupaten, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPR RI dan Anggota DPD RI. Dinasti politik Tuan Besar semakin kuat tidak saja melalui pengaturan jabatan politik dan pengaturan proyek tetapi berkembang dengan melakukan aktivitas ekonomi informal yang bersifat ilegal. Akibatnyaotonomi dan desentralisasi bisa dinilai rakyat justru memberikan kesengsaraan dan ketimpangan.[[14]](#footnote-15)

Yulion Zalpa, dalam tesisnya menjelaskan bagaimana negara (Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat) telah menjalin kerjasama dengan bos-bos lokal (pengusaha) dalam bisnis-politik tambang batu bara, adanya kerja sama dan kepentingan antara pemerintah daerah dan pengusaha tersebut telah melahirkan relasi baru antara pengusaha lokal dengan penguasa lokal yang ditandai oleh munculnya kekuatan-kekuatan baru di tingkat lokal atau elit daerah. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila terdapat kehadiran bos lokal seperti mafia, preman dan sebagainya dalam usaha penguasaan sumberdaya ekonomi.

Kebijakan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah Kabupaten Lahat untuk memanfaatkan peluang atas adanya desentralisasi termasuk juga pemburu-pemburu rente yang mencari keuntungan atas sumberdaya ekonomi daerah. Pemburuan rente semakin marak terjadi termasuk dalam pemberian konsensus pertambangan. Dalam kerangka otonomi daerah, konsensi pertambangan justru diberikan kepada perusahaan-perusahaan untuk mendulang keuntungan. Sedangkan perusahaan-perusahaan yang sudah mendapat izin sejak Orde Baru tetap dapat melenggang walaupun dalam praktiknya bermasalah.[[15]](#footnote-16)

Penelitian-penelitian di atas yang dilakukan oleh beberapa ilmuan membuktikan bahwa desentralisasi memberikan jalan bagi orang kuat lokal (*local strongmen*) untuk menguasai daerah-daerah yang kaya dengan sumber daya dan lemahnya negara (institusi formal) adalah salah satu faktor yang menyebabkan tumbuh sumburnya orang kuat lokal ini.

## Metode Penelitian

1. **Jenis Penelitian**

PenelitianVini menggunakan metode penelitianVkualitatif dengan pendekatanVstudi kasus (*Case Study*). Studi kasusVmemungkinkan peneliti untuk menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau masalah yang telah terjadisecara mendalam. Dengan studi kasus, dapat menelusuri bagaimana Peran negara dalam pengelolaan tambang minyak desa Kemang, bagaimana relasi antar aktor dalam mengelola tambang minyak di desa Kemang, bagaimana pandangan islam terhadap hubungan patro-klien dalam pertambangan minyak di desa Kemang,Oleh karena itu, informan penelitian yang dipilihVmerupakan representasi negaraVmelalui pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (eksekutif dan legislatif), elit lokalV(orang kuat lokal) di daerah tersebut, pelaku penambangVminyak dan institusi-institusiVyang terkait dengan temaVpenelitian.

Studi kasusVdisebut jugaVsebagai penelitian eksploratif.[[16]](#footnote-17) Oleh karen itu, penelitiVdapatVmengeksplorasi pengalamanVsubjektif orangVyang ditelitiVsekaligus maknaVyang mereka hubungkan dengan pengalaman-pengalamanVtersebut. Metode studi kasus ini dapat mempermudah dalam menggambarkanVfenomena relasi politikVdan bisnis pertambanganVminyak ilegal di KecamatanVSanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin.

1. **Jenis Data**

Dalam penelitian ini, data akan dibagi menjadi dua macam, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data yang diperoleh di lapangan melalui wawancara dan observasi langsung di tempat penelitian. Dalam penelitian ini data diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan tema penelitian ini. Selain itu juga melalui pengamatan langsung oleh peneliti selama berada di Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin. Narasumber yang diwawancarai adalah pejabat pemerintah Daerah Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin yang di anggap berhubungan dengan permasalahan penelitian, pelaku penambangan minyak, kelompok pengusaha (orang kuat lokal) tambang minyak di Desa Kemang Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin serta dinas-dinas yang terkait dengan penelitian.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku, makalah, jurnal dan dokumen-dokumen baik dokumen cetak maupun dokumen online yang berhubungan dengan penelitian ini. Dokumen tersebut berupa artikel, majalah, koran, berita online maupun dokumen resmi terkait fokus penelitian.
3. Lokasi Penelitian

Tempat peneliti melakukan aktivitas penelitian, yaitu di lahan tambang minyak, instansi-instansi pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin dan lembaga-lembaga ekonomi atau perusahaan yang terkait dengan tema penelitian.

## Teknik Pengumpulan Data

1. **Teknik Wawancara**

Adapun yang dimaksud dengan wawancara mendalam adalah *interview* informal yang dilakukan untuk mendapatkan data yang mempunyai kedalaman dan dapat dilakukan berkali-kai sesuai dengan keperluan penelitian. Dengan wawancara mendalam akan membantu peneliti untuk mendapatkan kedalaman dan kelengkapan informasi yang berkaitan dengan fokus penelitian yaitu tentang relasi kuasa antara orang kuat lokal dan pemerintah daerah Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin dalam praktik pertambangan minyak ilegal.

1. **Teknik Observasi**

Teknik pengumpulan data dengan observasi ini diperlukan untuk mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, kebiasaan dan sebagainya. Aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis, baik secara terlibat (partisipatif) ataupun nonpartisipatif. Tujuan dari dilakukannya observasi adalah untuk memvalidasi informasi yang dihasilkan oleh peneliti sebagai hasil dari wawancara mendalam tentang relasi kuasa antara orang kuat lokal dan pemerintah daerah Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin.

1. **Teknik Dokumentasi**

Teknik dokumentasi digunakan untuk melengkapi data atau sebagai penunjang serta dapat digunakan sebagai “bukti” sesuatu pengujian. Dokumen yang digunakan bisa berupa dokumen tulisan, foto lapangan yang berkaitan dengn obyek penelitian, dokumen data negara maupun *website*  serta hasil rekaman wawancara sebagai dokumen audio terkait tentang relasi kuasa antara orang kuat lokal dan pemerintah daerah Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin.

1. **Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Dalam melakukan analisis data kualitatif akan dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus dengan analisis interaktif dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keempat komponen tersebut berfungsi sebagai sebuah sistem pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data sehingga peneliti dapat melakukan pengkajian ulang ketika kesimpulan kurang memadai.

1. Pengumpulan Data

Pada analisis model pertama dilakukan pengumpulan data hasil wawancara, hasil observasi, dan berbagai dokumen berdasarkan kategorisasi yang sesuai dengan masalah penelitian yang kemudian dikembangkan penajaman data melalui pencarian data selanjutnya.

##### Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan final dapat ditarik dan diverifikasi.

1. Penyajian Data

Sajian data adalah suatu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan relasi yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan serta memberikan tindakan.

##### Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari sutu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Kesimpulan ditarik semenjak peneliti menyusun pencatatan, pernyataan-pernyataan, konfigurasi, arahan sebab akibat, dan berbagai proposisi.

## Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari penelitian ini, maka penulisan dilakukan secara terperinci dan sistematis. Gambaran lebih jelas tentang isi dari keseluruhan skripsi disajikan dalam empat bab, yaitu :

**Bab I Pendahuluan**

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**Bab II Sumber Daya Alam, Politik Lokal dan Otonomi Daerah**

Bab ini akan mengurai tentang Sumber Daya Alam, Politik Lokal dan Otonomi Daerah serta gambaran umum lokasi penelitian. Dalam hal ini lokasi penelitian yang dimaksud adalah Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin.

**Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan**

1. Peran negara dalam pengelolaan tambang minyak di Desa Kemang.
2. Pola relasi aktor patronase dalam pengelolaan tambang minyak ilegal di Desa Kemang.

**Bab IV Penutup**

Bab ini berisikan tentang simpulan dan saran penelitian.

1. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2011.Pelaksaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara*.* [↑](#footnote-ref-2)
2. *Lampiran UUD NRI Tahun 1945*,*Sebagai dasar hukum mengingat dalam undang-undang*, [↑](#footnote-ref-3)
3. Yuswalina, Adi Canda, “Pemanfaatan Sumur Minyak Tua Sisa Eksploitasi Peninggalan Belanda Dalam Hubungannya Dengan Perekonomian Masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin,” V, No. 13-1 (Juni 2017), hlm. 61. [↑](#footnote-ref-4)
4. Amrianto, *“Peranan Elit Tradisional Dalam Dinamika Politik Lokal Pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Wakatobi,” (Manado: Fakustas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Samratulangi, Skripsi, 2014), hlm. 4.* [↑](#footnote-ref-5)
5. Edward Aspinall Mada sukma djati,*patronase politik dalam demokrasi lokasl, jurnal politik uang di Indonesia. Hlm 56 tahun 2014.* [↑](#footnote-ref-6)
6. Hendra Try Ardianto,memutus interaksi patron-klien di lingkungan perkebunan.hlm 28 tahun 2009. [↑](#footnote-ref-7)
7. Yulion Zalpa,“Berburu Rente Di Tambang Emas Hitam : Relasi Kuasa Antara Pemerintah Daerah Dan Pengusaha Dalam Bisnis Tambang Batu Bara Di Kabupaten Lahat,” *Tesis* (Yogyakarta: Fakultas Politik Dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada, 2016), hlm. 2. [↑](#footnote-ref-8)
8. Syarif Hidayat, “Shadow State...?VBisnis dan Politik di Provinsi Banten,” dalam Henk Schulte Nordholt dan Gerry vanVKlinken (ed)*Politik Lokal di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,, 2007), hlm. 269. [↑](#footnote-ref-9)
9. *Ibid*, h. 17. [↑](#footnote-ref-10)
10. Leo Agustino, Mohammad Agus Yusoff, “Politik Lokal di Indonesia: Dari Otokratik Ke Reformasi Politik”(Jurnal Ilmu Politik *, Edisi 21,* 2010), h. 13. [↑](#footnote-ref-11)
11. Erwiza Erman, “Deregulasi Tata Niaga Timah dan Pembuatan Negara Banyangan Lokal”, dalam Henk Schulte Nordholt dan Gerry van Klinken (ed), *Politik Lokal di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,, 2007), h. 254. [↑](#footnote-ref-12)
12. Marcelino Solissa, “Fenomena Orang Kuat Lokal di Indonesia: Studi Kasus Tentang Kemunculan Keda Dalam Eksploitasi Tambang Emas di Gunung Botak Kabupaten Buru Provinsi Maluku,” V, No. 2-2(Juli 2016), h. 165. [↑](#footnote-ref-13)
13. Syarif Hidayat, “Shadow State...? Bisnis dan Politik di Provinsi Banten,” dalam Henk Schulte Nordholt dan Gerry van Klinken (ed)*Politik Lokal di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,, 2007), h. 267 - 303. [↑](#footnote-ref-14)
14. Leo Agustino, “Dinasti Politik Pasca-Otonomi Orde Baru : Pengalaman Banten,” V, No. 29-3 (Juli 2010), h. 115. [↑](#footnote-ref-15)
15. Yulion Zalpa, “Berburu Rente di Tambang Emas Hitam : Relasi Kuasa Antara Pemerintah Daerah dan Pengusaha Dalam Bisnis Tambang Batu Bara di Kabupaten Lahat”,*Tesis* (Yogyakarta: Fakultas Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada, 2016), h. 4. [↑](#footnote-ref-16)
16. Pupu saeful rahmat, “Penelitian Kualitatif,” (V, No. 5-9(Tahun 2009), hlm. 6. [↑](#footnote-ref-17)